IMPLEMENTASI SISTEM KEUANGAN DESA TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

IMPLEMENTASI SISTEM KEUANGAN DESA TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

Dara Fitra Sukwani^a, Dedy Wijaya Kusuma^b, Nurshadrina Kartika Sari^c

^a STIE Mandala, dafitsu@gmail.com

^b STIE Mandala, dedy@stie-mandala.ac.id

^c STIE Mandala, shadrina.kartika@stie-mandala.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

28 Februari 2021

12 Maret 2021

15 April 2021

Keywords:

Implementation of SOP, Reward System, Training, Work Environment and Work Productivity.

Kata Kunci:

Alokasi Dana Desa, Sistem Keuangan Desa, Transparansi, akuntabilitas, Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

ABSTRACT

Village Fund Allocation (ADD) is one source of rural income which is generally still the main source of income used in the conduct of government village. On efforts to oversee the transparency of village financial management, BPKP and the ministry of home affairs developed a village financial system application in 2015. The purpose of this study is to describe of the result of the evaluation of the village financial system on ADD financial management. And can provide government of ADD in accordance with the provisions of the legislation.

This research used qualitative descriptive approach with the case study research sites in Rambigundam village, Rambipuji, Jember. The data is collected through observation, interviews, and documentation to get the validity of the data, carried out technical examination of the validity of the data which is testing the credibility, transferability, dependability, and confirmability.

The result showed that the planning stage until the accountability village Allocation Fund stage have well done, but there are same problems of the implementation, they are the lack of participation from people, the lack of participation of Badan Permusyawaratan Desa (BPD), and the lack of village Implementation Teams in preparing the report Accountability Village Fund Allocation.

ABSTRAK

Alokasi Dana Desa (ADD), merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang pada umumnya masih menjadi sumber pendapatan utama yang digunakan dalam penyelenggaraan

pemerintahan desa. Pada upaya mengawasi transparansi pengelolaan keuangan desa, BPKP beserta Kemendagri membangun aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) pada tahun 2015. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan hasil evaluasi sistem keuangan desa terhadap pengelolaan keuangan ADD. Serta dapat memberikan manfaat bagi pemerintah desa sebagai pedoman dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan deskriptif kualitatif studi kasus pada Desa Rambigundam Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh keabsahan data, dilakukan teknik pemeriksaan keabsahan data yaitu uji kredibilitas, transferability, depability dan confirmability.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa baik perencanaan hingga pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa belum bisa dikatakan baik, masih ada beberapa kendala dalam penyelenggaraannya yaitu bentuk partisipasi masyarakat yang kurang maksimal, kurangnya partisipasi BPD, serta kurangnya kompetensi Tim Pelaksana Kegiatan Desa dalam menyusun Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa.

PENDAHULUAN

Pasca reformasi tahun 1998, tuntutan terdapatnya pemerintahan efektif yang tergambar dalam tata kelola pemerintahan yang terus bergulir. Berbagai penyakit birokrasi terutama terkait korupsi, kolusi, dan nepotisme diharapkan dapat diselesaikan dengan model pemerintahan yang efektif tersebut. Akuntansi pemerintahan merupakan ilmu akuntansi pencatatan keuangan negara yang dikerjakan oleh unit kerja hingga saat ini berkembang seiring berkembangnya zaman. Akuntansi pemerintahan tidak Cuma diimplementasikan pada pemerintahan pusat, akan tetapi harus diimplementasikan pula pada tingkat daerah hingga pada daerah pedesaan, yang memerlukan pertanggungjawaban pada tiap anggaran serta kegiatan yang diselenggarakan.

Bergulirnya era reformasi memberikan sinyal yang kuat akan adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Salah satunya adalah PP 105/2000 yang secara eksplisit menyebutkan perlunya standar akuntansi pemerintahan dalam pertanggungjawaban keuangan daerah. Penggunaan ADD rawan atas penyelewengan anggaran desa yang semestinya dapat dipercaya oleh warga untuk membangun desa menjadi semakin maju serta berkembang. Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) pada desa, dapat juga dijadikan suatu gambaran terlaksananya *good governance*, yang mana pemerintah dengan warga mempunyai hubungan yang erat sekaligus menambah keikutsertaan warga, sehingga dapat mendorong akuntabilitas, transparansi maupun responsivitas pemerintah lokal. Menurut Dwiyanto (2006:80) transparansi ialah selaku fasilitator informasi mengenai pemerintahan publik serta terjaminnya kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat maupun memadai.

Pada upaya mengawasi transparansi pengelolaan keuangan desa, BPKP beserta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membangun Aplikasi Sistem Keuangan Desa

(Siskeudes) ditahun 2015. Berdasarkan survei BPKP di tahun 2014, pengetahuan SDM perangkat desa benar-benar terbatas pada perihal keuangan desa, sedangkan uang yang harus dilakukan pengelolaan di Desa benar-benar banyak. Siskeudes merupakan aplikasi gratis yang bisa menjadi solusi. Maka sebab itu, beragam kalangan, mulai dari komisi XI DPR RI, Ketua KPK, sampai Presiden memberikan himbauan agar Siskeudes dapat diimplementasikan oleh seluruh desa diseluruh Indonesia.

Berdasarkan pendapat Waluyo, Astuty dan Fanida (2013), akuntabilitas mencakup atas pemberian informasi keuangan pada warga serta pemakai yang lain sehingga memberikan kemungkinan untuk mereka agar melakukan penilaian atas pertanggungjawaban pemerintah terkait seluruh aktivitas yang dilaksanakan, bukan cuma laporan keuangan, akan tetapi haruslah membagikan informasi pada pembuatan keputusan ekonomi, sosial serta politik. Menurut hasil penelitian saudari Enita Lestine As pada tahun 2019 bertempat diseluruh Desa Kecamatan Semboro menunjukkan hasil bahwa aplikasi siskeudes, kompetensi SDM, pemahaman akuntansi, pendiidkan serta pelatihan, pendampingan desa berpengaruh dengan simultan terhadap kualitas laporan keuangan sebesar 44%. Desa Rambigunam sendiri memiliki nilai Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar RP. 853.727.000,- dan setelah perubahan sebesar Rp. 769.783.000,- di tahun 2020. Jadi, semakin tinggi keterbukaan dan tanggungjawab pemerintah desa dalam pengelolaan ADD maka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa semakin baik juga.

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Desa

Menurut Saniyanti Nurmuharimah (2013) menyatakan Desa ialah wilayah yang ditempati oleh masyarakat yang memiliki sistem pemerintah sendiri. Pemerintahan Desa ialah lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang mempunyai peranan strategi guna mengatur warga yang terdapat di desa untuk mewujudkan pembangunan pemerintah.

Transparansi (*Transparancy*)

Berdasarkan pendapat Mardiasmo (2009) transparansi mempunyai definisi yakni keterbukaan (*openness*) pemerintah terkait kegiatan pengelolaan sumber daya. Transparansi informasi utamanya serta fiskal- harus dilaksanakan dengan bentuk relevan serta dapat gampang dimengerti. Salah satu aktualisasi nilai dan prinsip-prinsip *good governance* adalah transparansi aparatur dan sistem manajemen publik harus mengembangkan keterbukaan dan sistem akuntabilitas.

Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas asalnya dari bahasa latin yakni *accomptare* yang mempunyai arti memberikan pertanggungjawaban serta mempunyai asal kata *compure/patare* yang maknanya menghitung /perhitungan. Sementara itu akuntabilitas pada istilah bahasa inggris yakni *accountability* yang maknanya pertanggungjawaban ataupun kondisi

untuk ditanggungjawabkan ataupun kondisi untuk diminta pertanggungjawaban.

Tingkat akuntabilitas pada pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) diawali dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban. Media akuntabilitas yang baik berupa laporan-laporan dan bisa mengungkapkan tujuan lewat pengelolaan sumber daya berupa kinerja individu, unit kelompok maupun organisasi. Tujuan itu bisa diketahui pada rencana strategis serta program kerja tahunan, dengan senantiasa berkiblat terhadap RPJM (Rencana Jangka Panjang dan Menengah) serta RKP (Rencana Kerja Pemerintah).

Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Berlandaskan Permendagri No.937 Tahun 2007 terkait Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan jika ADD berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang berasal dari bagian dana perimbangan keuangan pusat serta daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikitnya 10%. Tahapan pengelolaan Alokasi Dana Desa di atur secara garis besar dimulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban mulai periodisasi satu tahun anggaran, dihitung dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember.

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (*Siskeudes*)

Sistem keuangan Desa ialah sistem yang mempunyai fungsi guna melaksanakan pengelolaan keuangan atas Desa melalui tujuan guna mewujudkan tata kelola keuangan Desa yang bersih, akuntabel, tertib, efektif serta efisien. Aplikasi tersebut dilakukan pengembangan dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) untuk rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa.

Melalui proses input sekali sesuai atas transaksi yang tersedia, bisa menghasilkan output seperti dokumen penatausahaan serta sejumlah laporan yang sesuai atas ketentuan per undang-undangan, diantaranya yakni berkas Penatausahaan, Bukti Penerimaan SPP ('Surat Permintaan Pembayaran'), SSP ('Surat Setoran Pajak') serta sejumlah berkas yang lain. Beberapa laporan diantaranya yakni Laporan Penganggaran (Perdes APBDes, RAB, APBDes per sumber dana) serta Laporan Penatausahaan (Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pajak, Pembantu, dan Register).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran Objek Penelitian

Pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode penelitian deskriptif digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, metode penelitian induktif. Berdasarkan pendapat Sugiyono (2011), metode penelitian kualitatif ialah metode penelitian yang berdasarkan kepada filsafat post positivisme, dipakai guna melakukan penelitian suatu objek yang alamiah, (seperti lawannya yakni eksperimen) yang mana peneliti berkedudukan selaku instrumen kunci.

Metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan data yang terkumpul secara

sistematis dan akurat. Dengan menggunakan metode ini, diharapkan penulis dapat menggambarkan keadaan secara jelas mengenai Implementasi Siskeudes terhadap pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Rambigundam Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember pada tahun 2020.

Data dan Jenis Data

Data penelitian ini Kualitatif dalam bentuk Deskriptif, berwujud kata-kata lisan ataupun tulisan mengenai perilaku seseorang yang bisa dilakukan pengamatan. Data Kualitatif tersebut berupa penjelasan secara rinci, kutipan langsung, serta dokumentasi kasus. Jenis data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari hasil wawancara pada pihak Desa tentang akuntabilitas serta transparansi pada pelaksanaan Teknis ADD di Desa Rambigundam. Sedangkan Data sekunder berbentuk dokumen pedoman pelaksanaan ADD contohnya Laporan Realisasi ADD tahun 2020, Laporan Pertanggungjawaban, RPJM dan RKP Desa.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai pada penelitian ini yakni teknik dokumentasi, observasi, studi literatur serta wawancara. Adapun yang menjadi subyek pada penelitian ini yaitu sejumlah informan yang dipercaya bisa memberi informasi yang diperlukan contohnya mencakup dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara, serta Kepala Seksi Pembangunan yaitu pihak yang kompeten pada pengelolaan Alokasi Dana Desa melalui tujuan guna mengetahui Akuntabilitas dan Transparansi dalam pengelolaan ADD di Desa Rambigundam Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember.

Metode Analisis Data

Metode serta analisis data memiliki tujuan guna menyerderhanakan semua data yang diperoleh, menguraikan secara sistematis, selanjutnya melakukan pengolahan, mengartikan serta menjelaskan data tersebut. Analisis data adalah usaha penyelesaian permasalahan penelitian guna mendapatkan jawaban dari masalah yang diamati. Permasalahan pada penelitian ini akan dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif.

Analisis data pada penelitian ini menggunakan *Interactive Model of Analysis* yang menitikberatkan pada tiga komponen, yakni reduksi data, penyajian data serta pengambilan kesimpulan ataupun verifikasi.

Pengecekan Keabsahan Data

Uji keabsahan data mencakup atas (1) Kredibilitas data, (2) Transferabilitas (validitas eksternal/ generalisasi), (3) Dependabilitas (reliabilitas) data, dan (4) Konfirmabilitas (obyektivitas).

PEMBAHASAN

Pembahasan Analisis terhadap temuan di Desa Rambigundam

Berikut hasil penelitian oleh penulis dengan wawancara dengan informan kedelapan yang merupakan salah satu perangkat Desa Rambigundam sebagai pelaksana kegiatan Kasi Kesejahteraan Desa Rambigundam menyatakan sebagai berikut :

1. Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 39 ayat 1 berbunyi “Kepala Desa menyampaikan informasi terkait APBDes terhadap warga melalui media informasi” Dan Pasal 72 ayat 1 berbunyi “Laporan sebagai halnya dimaksud pada Pasal 68 serta Pasal 70 diinformasikan terhadap warga melalui media informasi”. realisasinya kepala desa tidak menyampaikan kepada masyarakat luas. Dalam kesatuan lembaga pun tidak disampaikan keseluruhan, jadi hanya beberapa garis besarnya yang disampaikan kepada Perangkat Desa dan anggota BPD. Pernyataan ini diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Widiyanti pada tahun 2017, kutipan yang menyatakan “di Desa Kandung Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan memperlihatkan hasil yang tidak akuntabel dan transparan. Bukan hanya tidak transparan kepada warga akan tetapi kepada pihak internal mereka sendiri”.
2. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 45 ayat 1 berbunyi “Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi Pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lambat tiga hari kerja sesudah Peraturan Desa terkait APBDes serta Peraturan Kepala Desa terkait Penjabaran APBDes ditetapkan”. Realisasinya Kepala Desa tidak menugaskan semua Kaur maupun Kasi yang ada di dalam struktur organisasi pemeritahan desa, kecuali Kaur Keuangan dan Kasi Kesejahteraan saja yang terlibat didalam untuk menyusun perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban APBdes tersbut.

Pemerintah desa bisa menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dengan terus meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan aparatur pemerintah desa dengan mempertimbangkan tingkat pendidikan dalam suatu jabatan pekerjaan di struktural pemerintah desa, serta memberikan pelatihan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, dan dibantu oleh pendampingan desa harus benar-benar maksimal. Sehingga aparatur desa dapat melakukan tata kelola keuangan desa secara baik dan memakai Aplikasi Sistem keuangan desa secara maksimal, serta pemerintah desa mampu menerima setiap perubahan dan pembaharuan sistem keuangan yang ada di desa.

3. Permendagri Pasal 52 ayat 4 berbunyi “Pengadaan melalui swakelola sebagai halnya dimaksud dalam ayat 3 dilaksanakan dengan memaksimalkan pemakaian material ataupun bahan dari wilayah setempat serta gotong-royong dengan

melibatkan keikutsertaan warga guna memperluas kesempatan kerja serta pemberdayaan warga setempat”. Realisasinya seluruh pengadaan menggunakan swakelola dengan tidak melibatkan warga setempat untuk diberi kesempatan kerja dan untuk lebih memilih jasa pekerja diluar desa. Dan Pasal 54 ayat 1 berbunyi “Pemakaian anggaran yang diterima dari pengajuan SPP sebagai halnya dimaksud pada Pasal 53 untuk kegiatan pengadaan barang ataupun jasa secara swakelola tidak lebih dari 10 hari kerja”. Realisasinya swakelola dikerjakan lebih dari 10 hari kerja dan Kepala Desa sendiri yang melaksanakan belanja pengadaan barang/ jasa setiap kegiatan tanpa melibatkan Kaur dan Kasi sebagai pengguna anggaran.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Peneliti menyimpulkan untuk pemerintahan Desa Rambigundam belum bisa dikatakan transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan desa. Dikarenakan masih adanya birokrasi didalam organisasi pemerintahan Desa Rambigundam Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember. Pernyataan ini dipertegas dengan bukti bahwa Kepala Desa Rambigundam memberikan kebebasan bagi yang melanggar peraturan (seperti tidak masuk kerja tanpa ijin, tidak melaksanakan Tupoksi dan lainnya) kepada beberapa perangkat desa terutama pihak laki-laki dengan perjanjian tidak ikut serta andil dalam pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan pemerintah Desa Rambigundam.

Untuk Berikut penulis sajikan tabel dari kesimpulan analisis pembahasan sebagai berikut :

Saran

Untuk keseluruhan pemerintahan Desa Rambigundam masih perlu adanya pelatihan, pendampingan, dan pengawasan dari pemerintah pusat terkait penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa yang efektif serta efisiensi, dengan berdasarkan asas-asas pengelolaan keuangan desa. Pemerintah Desa Rambigundam haruslah semakin aktif untuk melihat dan mendengarkan kebutuhan serta keluhan dari masyarakat guna terbentuknya desa yang maju dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

Andrianto, Nico. 2007. *Transparansi Dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*. Malang: Bayumedia Publishing.

Anugerah, r., mering, a., dan fretisari, i. Peran dinas pemuda olahraga kebudayaan dan pariwisata dalam mengapresiasi seniman daerah kabupaten sambas 2008-2014. *Jurnal pendidikan dan pembelajaran khatulistiwa*, 5(5).

Astuty, E. 2013. *Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)*. Publika, 1(2).

Bastian, Indra. 2006. "Kajian Interpretasi dan Implementasi PSAP Nomor 01-Penyajian Laporan Keuangan". *Telah Kritis PP Nomor 24 Tahun 2005 (Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik)*. Yogyakarta : PBF.

Damayanti, W. 2018. *Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi kasus: Desa Tegiri dan Desa Sumberagung Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Dwiningsih, Susteya dan Pepie Diptyana. 2006. "Laporan Keuangan Pemerintah Tanpa Laporan Surplus dan Defisit". *Runtuhnya Sistem Manajemen Keuangan Daerah (Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik)*. Yogyakarta: PBF.

Fajri, R. 2015. *Akuntabilitas Pemerintah Desa pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang)*. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(7), 1099-1104.

Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. 1981. *Effective evaluation: Improving the usefulness of evaluation results through responsive and naturalistic approaches*. Jossey-Bass.

Gunawan, I. 2013. *Metode penelitian kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara, 143.

Halim, Abdul. 2007. *Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah: Akuntansi Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

<https://eprints.umm.ac.id/44186/4/jiptummpg-gdl-nitawulanb-47227-4-babiii.pdf> (11-01-2021)

https://id.wikipedia.org/wiki/Rambipuji,_Jember.diakses tanggal 3-01-2021

<https://kominfo.go.id/content/detail/1574/aplikasi-siskeudes-untu-transparansi-keuangan-desa>.diakses tanggal 28-12-2020

<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4260904/dua-desa-di-jember-diperiksa-satgas-kemendes-soal-pengelolaan-dana>.diakses tanggal 28-12-2020

<https://www.bpkp.go.id/uu/file/8/29.bpkp>diakses tanggal 28-12-2020

<https://www.Coursehero.com/file/p3t602h/AgusDwiyanto-200680-mendefinisikan-transparansi-sebagai-penyediaan-informasi>.diakses tanggal 28-12-2020

<https://www.Google.com/amp/s/www.jogloabang.com/desa/permendagri-2018-pengelolaan-keuangan-desa>.diakses tanggal 28-12-2020

Indrawati, L. 2018. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Pucangsimo Kecamatan BandarKedungmulyo Kabupaten Jombang (Doctoral dissertation, STIE PGRI DEWANTARA).

Irma, A. 2015. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi. Katalogis, 3(1).

Kumalasari, D., dan Riharjo, I. B. 2016. Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa pada pemerintahan Desa Bomo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA), 5(11).

Kholmi, M. 2017. Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (studi di desa kedungbetik kecamatan kesamben kabupaten jombang). Journal of Innovation in Business and Economics, 7(2), 143-152.

Kusmarni, Y. 2012. Studi Kasus. UGM Jurnal Edu UGM Press.

Mahmudi, 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.

Musianto, L. S. 2004. Perbedaan pendekatan kuantitatif dengan pendekatan kualitatif dalam metode penelitian. Jurnal Manajemen dan kewirausahaan, 4(2), pp-123.

Nasirah, N. 2016. Analisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (studi pada desa mulyoagung kecamatan dau) (doctoral dissertation, university of muhammadiyah malang).

Nasution, A. P. 2020. Implementasi e-office sebagai upaya peningkatan tranparansi dan akuntabilitas pada universitas pembangunan panca budi. Jurnal akuntansi bisnis dan publik, 11(2), 111-121.

Ndruru, A. Y. 2019. Analisis Data Time Series Jumlah Penggunaan Alat

Kontrasepsi Implan pada Akseptor Aktif dan Baru di Kota Pematangsiantar Tahun 2019-2023.

Peraturan Bupati Nomor 12. 2015. *Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa.*

Peraturan Bupati Nomor 5. 2016. Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015. *Tentang Desa*

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7. 2015. *Tentang Desa.*

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 *tentang Standar Akuntansi*

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000. Tentang Pengelolaan & Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000. Tentang Pertanggungjawaban Kepada Daerah.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 72. 2005. *Tentang Sumber Kedudukan Keuangan Desa.*

Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2005 *tentang Standar Akuntansi Pemerintah.*

Permendagri Nomor 37. 2007. *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.*

Permendagri Nomor 29 Tahun 20002. *Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan PP Nomor 105 Tahun 2000.*

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.*

Risya, Umami, dan Nurodin, Idang. 2017. Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi (Jurnal Akuntansi, Pajak dan Manajemen), 6(11), 74-80.

Sandy, a. C. 2020. Tinjauan yuridis pengelolaan keuangan desa dalam perspektif undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Lex administratum, 8(4).

Septa, P. 2018. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Ponorogo (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Tentang Pemerintahan Daerah.

Sholikhah, d. A., & winarno, j. Perencanaan pengelolaan keuangan desa di

desa baturono kecamatan sukodadi kabupaten lamongan.

Sugiyono, S. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D*. Bandung Alf.

Suyatin, S. 2015. Pengukuran kinerja dalam penguatan manajemen strategis organisasi sektor publik. *Dedikasi*, 31(2), 183-198.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999. *Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat & Daerah*.

Undang-Undang Pasal 24 Tahun 2014. *Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*.

Usman, S., Sulaksono, B., Budiati, S., Widyanti, W. D., Fillaili, R., Suryadarma, D., ... & Erlita, S. Kajian Cepat Pelaksanaan Subsidi Langsung Tunai Tahun 2005 di Indonesia: Studi Kasus di Provinsi DKI Jakarta. SMERU Research Institute.

Wida, S. A., Supatmoko, D., & Kurrohman, T. 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 4(2), 148-152.

Widiyanti, A. 2017. Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa: Studi Pada Desa Sumberejo Dan Desa Kandung Di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

Winarna, Jaka. 2006. "Tinjauan Kritis Dasar Akuntansi Pemerintahan". Dalam *Standar Akuntansi Pemerintahan*. *Telah Kritis PP Nomor 24 Tahun 2005* (Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik). Yogyakarta: PBF.

Yani, A., Mangkunegara, A. A. P., Revisi, P. K. E., & Aditama, R. Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Yuliani, N. 2017. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Karakteristik Kualitatif, Aksesibilitas dan Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 24(1).

Yunita, A., & Christianingrum, M. 2018. Measurement of Accountability Management of Village Funds. *Integrated Journal of Business and Economics*, 2(1), 99-103.